



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : GUNAWAN
NIK : 3201130807740003
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN
Sub Unit Kerja : BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 5 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**UNIT KERJA :
PERTANIAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GUNAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI BESAR**
3. NHK : **794490**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.490.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/150 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/50 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 262.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA / MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA GL 200 R/ SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA 4 LANGKAH / SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	264.777.648
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.017.277.648
III. HUTANG	Rp.	8.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.009.277.648

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ROBY DARMAWAN
NIK : 3171041512690001
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN
Sub Unit Kerja : BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU
Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 28 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROBY DARMAWAN
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 404321

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.473.234.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.098.234.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 763.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ZENIX Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. MOBIL, BYD ATTO1 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 255.650.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 988.056.209

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.479.940.209

III. HUTANG

Rp. 279.401.478

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.200.538.731

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : BAYU ARIAWAN
NIK : 5301101207840002
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN
Sub Unit Kerja : BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 6 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAYU ARIAWAN
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 928655

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 77.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOBIL, SUZUKI SPLASH Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 203.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 544.200.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 544.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : WIJARWATI

NIK : 3402034705790001

Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Kerja : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN

Sub Unit Kerja : BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR

Jenis Laporan : Khusus - Awal Menjabat

Tanggal Kirim : 4 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA :
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIJARWATI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 1000991

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.390.530
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	25.390.530

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 25.390.530

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SITTI AMINAH DAIMAN

NIK : 3174045008800021

Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Kerja : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN

Sub Unit Kerja : BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jenis Laporan : Khusus - Awal Menjabat

Tanggal Kirim : 9 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA :
PERTANIAN**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SITI AMINAH DAIMAN
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 1000278

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/36 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 58.000.000

1. MOTOR, N MAX MAXI SCOOTER Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, SUZUKI THUNDER 125 NAKED SPORT TOURING EKONOMIS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 191.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 549.000.000

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 549.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ENDANG OKTAVIA GIRI

NIK : 5301086510820004

Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Kerja : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN

Sub Unit Kerja : BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN

Jenis Laporan : Periodik - 2025

Tanggal Kirim : 4 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENDANG OKTAVIA GIRI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 789945

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 80.000.000

1. Tanah Seluas 356 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 95.000.000

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1,36 M/T Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 28D MIO A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 175.004.842

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 350.004.842

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 350.004.842

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : YUNINDAH LESTARI LAPIHU
NIK : 5371045106930004
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN
Sub Unit Kerja : BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 26 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNINDAH LESTARI LAPIHU
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 928657

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah Seluas 98 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 332 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 157.500.000

1. MOBIL, HONDA BRIO BRIO SATYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA SUPRA X Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 862.500.000

III. HUTANG Rp. 522.846.202

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 339.653.798

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.